

Pemenuhan Hak – Hak Kesejahteraan Masyarakat Difabel di Provinsi Bali

I Made Oscar Sakti Chrispayana¹⁾, Bandiyah²⁾, I Ketut Erawan Putra³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

E-mail : oscarChrispayana3@gmail.com¹⁾ dyah_3981@unud.ac.id²⁾ ketut.erawan@ipd.or.id³⁾

ABSTRACT

The purpose of this research analyzes and describes how the fulfillment of rights that exist in the daily life of people with disabilities in Bali. The method used on this research is qualitative with an explanative descriptive type. The theory used on this research is Welfare State theory from Francis Fukuyama, Asa Briggs and Critical Theory from Iris Maroune Young. This theory explains state responsible to make sure the laws and policies that are born are obeyed by the citizen and also guarantee the rights and State should able to see another point of view from minorities how the public policy works. From the analysis carried out, there is a diversity of positions conveyed by the informants. Most of the informants revealed that the government or related institutions did not optimally implement a policy to make sure the rights for disabilities people.

Keywords: Disabled Society, Welfare State, Critical Theory

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, begitulah tertulis pada Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut sudah memberi kejelasan bagi seluruh warga Negara Indonesia bahwa segala aspek kehidupan dalam bernegara sudah di atur pada hukum yang bersifat adil dan menyeluruh. Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang di dapatkan secara alamiah, hak tersebut tidak hanya terkait dengan hak untuk hidup saja. Tetapi juga kebebasan pribadi dan hak atas kepemilikan sesuatu.

juga mewadahi hak - hak masyarakat difabel dalam kegiatan kehidupannya di masyarakat *Different Ability people* atau yang dikenal dengan singkatan difabel merupakan sebutan bagi kelompok masyarakat yang memiliki

perbedaan kemampuan dalam hal tertentu (Putri, 2011: 17). Perbedaan kemampuan ini dapat merujuk pada keadaan fisik maupun mental seseorang. Sehingga, menuntut terdapatnya suatu cara atau usaha yang berbeda agar dapat melakukan aktivitas yang ingin dicapainya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas atau difabel dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut, yang pertama adalah cacat fisik, cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain terganggunya aktivitas untuk berbicara, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan gerak tubuh. Cacat dapat digolongkan menjadi 2 klasifikasi yang pertama hanya mengalami satu cacat dan

yang kedua cacat ganda, berikut adalah jenis orang yang mengalami satu jenis cacat saja. Ada cacat fisik, cacat fisik diklasifikasi lagi menurut sebab cacatnya, ada cacat yang di dapat sejak lahir, lalu ada cacat yang disebabkan oleh penyakit, ada juga cacat yang di sebabkan karena kecelakaan dan terakhir adalah cacat karena korban perang. Dan yang ke dua adalah mengalami suatu cacat mental, cacat mental ialah suatu kelainan mental atau juga tingkah laku yang bisa juga cacat bawaan atau di dapatkan pada saat kelahiran ataupun akibat dari suatu penyakit. Dan yang terakhir adalah cacat *double* atau cacat secara fisik dan mengalami cacat mental. berkembang pada umumnya. Seringkali masih banyak penyandang difabel yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak kesejahterannya, penyandang difabel kerap kali diabaikan karena di anggap sebagai masyarakat kelas dua.

Ide dari tulisan ini berdasarkan fakta yang dimana pemerintah mempunyai suatu kewenangan dan berkewajiban mengatur, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat . Negara berkewajiban menjamin setiap individu maupun kelompok tanpa membedakan status sosial supaya dapat memperoleh akses pelayanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, fasilitas umum dan pelayanan publik. Kurangnya pemenuhan hak kesejahteraan bagi kaum difabel oleh pemerintah menjadi daya fokus utama bagi peneliti. Jadi, pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk membeberkan serta menganalisis bagaimana implementasi pemerintah dalam

membantu mensejahterakan kaum di fabel dan apa saja hak – hak kaum di fabel yang belum terpenuhi hingga saat tulisan ini di buat. Dari latar belakang diatas peneliti memilih judul penelitian Pemenuhan hak – hak kesejahteraan kaum difabel di Provinsi Bali.

2.KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai pemenuhan kesejahteraan kaum difabel saat ini mulai banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang peningkatan kesejahteraan kaum difabel. Banyaknya hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan kaum difabel. Selain itu, dalam melaksanakan penelitian ini tentunya terdapat metode, subjek, dan tujuan yang berbeda.

Kajian pertama memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Mubarak (2011) dengan judul “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Tubuh di PSBD Wirajaya Makassar”. Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Panti Sosial yang menangani Penyandang Cacat Tubuh memprioritaskan sasaran kerja adalah salah satu upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang cacat tubuh. Dan dalam penelitian ini di jelaskan beberapa kendala bagaimana membuat sumber daya manusia penyandang cacat tubuh di PSBD menjadi bagus untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. strategis untuk pembinaan di kelas yang

sama.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan Pujianti (2018) yang berjudul "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel di kota PANGKALPINANG" memiliki persamaan dengan peneliti. Penelitian yang di hasilkan oleh Pujianti menghasilkan kesimpulan bahwa ruang publik di Kota Pangkalpinang masih belum aksesibel bagi difabel. Meskipun sudah ada PERDA yang mengatur tentang fasilitas ruang publik untuk kaum difabel

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tridiwa Arief Sulisty (2016) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" memiliki berbagai persamaan dengan peneliti yaitu dari segi aksesibilitas fasilitas umum dan juga kesejahteraan dalam hal pendidikan untuk kaum difabel. Penelitian yang di hasilkan oleh Arief bahwa belum terjadinya pendidikan yang inklusif yaitu pendidikan dimana seseorang difabel dapat menempuh pendidikan bersama dengan orang normal pada umumnya. Meskipun pendidikan inklusif ini sudah berlandaskan dari UU RI No.2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang membahas pendidikan bagi difabel yang dilakukan secara inklusif serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dalam pengimplentasiannya kebijakan pendidikan inklusif, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih jauh dari kampus yang rama bagi difabel. Karena kampus ini hanya memberikan kesempatan

pada mahasiswa difabel untuk dapat berkuliah namun pelayanan serta aksesibilitas dari fasilitas kampus belum cukup memberikan suasana kepada mahasiswa difabel.

Welfare State

Penelitian ini menggunakan teori *Welfare State* dan Dalam sejarahnya teori *Welfare State* yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, yaitu : (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *right to education and the expansion of modern mass educations systems*.

Critical Theory

Negara kesejahteraan menjadi wacana dalam mengimplementasikan kesetaraan, ternyata menimbulkan masalah baru yaitu membuat sebuah garis perbedaan dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang kuat (majority) karena mereka dianggap sebagai kumpulan-kumpulan individu dalam jumlah besar yang memegang kebijakan dan mereka yang lemah terhadap kebijakan minority (Young. 2000: 15). Tidak hanya membuat kebijakan yang menguntungkan atau berpihak pada (majority), tetapi negara juga harus bisa menjamin minoritas sebagai bentuk pluralitas. Bentuk kebijakan yang bijak tidak lain bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Young, 1990: 18) Oleh karena itu konsep keadilan yang disampaikan oleh Young

berusaha agar setiap grup sosial memiliki hak untuk merepresentasikan kepentingannya dalam ranah publik (1990: 184). Merepresentasikan suara dari grup sosial yang mengalami penindasan berarti mentransformasikan posisi mereka menjadi setara dengan kelompok yang selama ini telah dominan dalam pembuatan kebijakan publik. Young mengajukan ide *differentiated citizenship* agar mereka yaitu kelompok minoritas yang mengalami ketidakadilan sosial karena dianggap berbeda dapat menjalankan kesetaraan politik yang telah mereka miliki sebagai warga negara untuk meminta perlakuan khusus agar dapat membawa pada kesetaraan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari sebuah fenomena. Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian deskriptif dan eksplanatif (Taylor dan Bogdan dalam Sutinah & Suyanto, 2013: 174). Moleong (2014: 11) menyatakan bahwa jenis penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penyajian data berbentuk kata-kata serta gambar yang didapat dari proses suatu wawancara juga digunakan beberapa dokumen resmi lainnya sehingga penelitian akan dapat menggambarkan keadaan dalam bentuk aslinya. Penulis menggunakan pemaparan secara deskriptif untuk memberikan gambaran keadaan serta peristiwa di lapangan secara runtut dan terperinci. di Indonesia terhadap kaum difabel di Bali ditinjau dari sisi *welfare state*

dan *critical theory*. Sedangkan penelitian eksplanatif digunakan untuk memberikan penjelasan pada suatu fenomena (Moleong, 2013: 257). Dalam penelitian ini, jenis eksplanatif sangat penting digunakan karena mampu memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa konsep *welfare state* tidak berjalan dengan baik dalam kasus kesejahteraan difabel di Bali.

Lokasi dalam penelitian ini yakni di Kota Denpasar, Bali. Pemilihan Kabupaten Denpasar ini didasarkan karena domisili informan kunci yakni ketua Bali *Deaf community* dan informan tambahan yakni beberapa teman – teman difabel lainnya yang berada di Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa konsep *welfare state* tidak berjalan dengan baik dalam kasus kesejahteraan difabel di Bali. Maka dari itu, jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. dalam penelitian ini adalah pengamatan sekaligus wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah ditentukan yakni ketua Bali *Deaf Community*, dan beberapa teman – teman difabel serta keluarga mereka. berbagai Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam informan yakni informan kunci, utama, dan tambahan. Selanjutnya informan utama teman – teman tuli, masyarakat tuna daksa dan masyarakat tuna netra. Pemilihan tersebut dikarenakan informan di atas dirasa cocok untuk memberikan informasi apa saja isu – isu pemenuhan hak kaum difabel yang ada di Bali. Informan tersebut juga berlaku sebagai pemberi informasi terkait dengan bagaimana pemerintah atau negara tidak

dapat menjalankan fungsinya dengan sebagai welfare state untuk memenehui hak – hak kaum difabel. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah keluarga atau masyarakat dari teman – teman difabel tersebut. Adapun kategori usia yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah berkisar antara tujuh belas hingga lima puluh tahun Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri di mana peneliti terjun langsung dalam proses pengambilan data guna mendapatkan data yang sesuai dengan fakta dan keadaan sosial di lapangan. ini. Hal ini kemudian diterapkan dalam penelitan yang telah dilakukan penulis guna meneliti mengapa Konsep Welfare State dalam pemenuhan hak – hak kesejahteraan tidak terlaksana dengan baik bagi kaum difabel di Bali

4. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Difabel Di Provinsi Bali

Penanganan isu penyandang difabel masih sebatas konsep yang belum terimplementasikan secara nyata. Hal ini seperti dikemukakan perwakilan SOMSWD untuk Indonesia sekaligus Direktur Jenderal Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Makmur Sunusi dalam Konfrensi Pers Forum Disabilitas Asia (ADF). Ia menyatakan bahwa di kebanyakan negara ASEAN, penanganan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sebagian besar masih sebatas tahapan rapat tingkat pejabat hanya saja belum sampai pada proses implementasinya

.Dalam perwujudan pemenuhan hak – hak

masyarakat difabel khususnya di daerah Bali, yang mengacu pada peraturan daerah provinsi Bali nomor 9 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang belum menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi. Yang tertuang pada pasal 5 perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas setiap masyarakat difabel mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang : pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, seni budaya dan olah raga, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, bantuan hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan rehabilitasi. berbagai bidang. Kelima Mengkomunikasikan bahasa isyarat sengan orang-orang Tuli dan “orang dengar”

4.2 Hasil Temuan

4.2.1 Welfare Difabel Terhadap pendidikan

Menurut wawancara peneliti dengan bapak I Gede Winaya tentang bagaimana tuna netra mendapatkan hak nya dalam bidang pendidikan, bapak Winaya mengatakan untuk sekarang sudah lebih baik dari pada berpuluh tahun yang lalu, beliau mengatakan sekarang bahwa pendidikan untuk tuna netra dari SD – SMA sudah ada sekolah khusus yang menanganinya tidak seperti puluhan tahun yang lalu dimana

masyarakat yang mengalami kebutaan mau tidak mau jika ingin menempuh pendidikan harus mengikuti sekolah umum biasa dan pada saat itu masih sangat sulit untuk mencari sekolah yang mempunyai fasilitas huruf *braille* sehingga diperlukannya pembimbing untuk melakukan kegiatan belajar mengajar namun yang disayangkan adalah beliau mengatakan bahwa universitas dan perguruan tinggi di Bali masih belum banyak menyediakan sarana pembantu masyarakat tuna netra.

4.2.2 Welfare Difabel Pada Kesehatan di Bali

Fakta di lapangan berkata bahwa dalam hak – hak kesehatan belum berjalan dengan baik, menurut teman – teman difabel yang saya wawancarai masih banyak kekurangan dalam implementasi hak difabel dalam bidang kesehatan dengan baik dimulai dari keluhan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan kesehatan dalam menunjang aktivitas mereka maupun dengan pelayanan kesehatan yang pemerintah berikan seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) ataupun BPJS Implementasi kebijakan kesehatan juga kurang terasa optimal bagi bapak I Gede Winaya yang menyayangkan harga iuran BPJS dirasa sangat tinggi bagi masyarakat difabel seperti beliau yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya yang membuat dirinya memaksa untuk memakai KIS (Kartu Indonesia Sehat) meskipun dengan kenyataan bahwa terpaksa memakai kartu Indonesia sehat kelas 3 dengan iuran Rp.42.000.00 yang dirasa masih cukup mahal.

4.2.3 Welfare Difabel Dalam Memperoleh Pekerjaan di Bali

Implementasi kebijakan ini terasa sangat tidak berjalan dengan optimal karena ketika saya bertanya kepada teman – teman difabel tentang apakah teman – teman difabel dapat atau bisa bekerja di perusahaan, kebanyakan dari mereka menjawab sangat sulit untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, dan banyak dari mereka bahkan sudah sangat pesimis untuk dapat bekerja di suatu perusahaan, banyak dari mereka memutuskan untuk menjadi seorang wiraswasta demi untuk melanjutkan hidup. Cerita yang sama datang pula dari Zulham Danio Shahby seorang pemilik studio foto sekaligus fotografer yang berbicara bahwa selain skill teman – teman difabel juga perlu untuk menambahkan atau memperluas relasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, seperti yang ia terangkan dalam wawancara bahwa difabel untuk era sekarang diperlukan relasi yang luas jika ingin mendapatkan pekerjaan, karena jika seorang difabel tidak mempunyai relasi atau koneksi yang luas difabel tersebut akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan.

4.2.4 Welfare Difabel Pada Pelayanan Publik Dan Fasilitas Publik

Implementasi penyelenggaraan kebijakan tentang aksesibilitas dan pelayanan publik bagi teman – teman difabel dirasa kurang optimal dan tidak menyeluruh menurut teman – teman difabel seperti kurangnya fasilitas umum penunjang kegiatan difabel dan masih kurangnya pegawai pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan difabel seperti :

mengerti bahasa isyarat atau kurangnya juru bahasa isyarat di pusat pelayanan masyarakat

4.2.5 Kebijakan Pemerintah Bali

Saat peneliti menemui salah satu anggota dari komite daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Provinsi Bali yaitu dengan Ibu Made Murdani selaku bendahara dari Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Bali menjelaskan bagaimana Komite ini bekerja dalam membela hak – hak penyandang disabilitas masyarakat di Bali, Bantuan atau kegiatan apa saja yang telah dilakukan, kendala – kendala apa saja yang dialami dalam bagaimana komite ini membantu masyarakat difabel di Bali dan bagaimana Keadaan Masyarakat difabel di Bali. kurangnya tenaga pengajar dan staff instansi pendidikan yang menunjang teman – teman difabel untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini berbanding terbalik seperti apa yang dikatakan Asa Brigs yang mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan sosial dengan standar sosial dan juga tanpa membedakan status sosial dan kelas sosial. Beliau menerangkan bahwa pemerintah

sudah berusaha dengan baik untuk membantu masyarakat difabel di Bali, pertama – tama beliau juga menyatakan pemerintah bukan sama sekali tidak peduli dengan masyarakat difabel tapi hanya saja belum optimal hasilnya di lapangan, beliau menjelaskan selama ini komite sudah membantu masyarakat difabel di bali dengan melakukan pendidikan khusus seperti kelas bahasa isyarat kepada masyarakat yang mempunyai anggota keluarga tuli atau juga edukasi terhadap masyarakat di tentang bagaimana masyarakat difabel harus diberikan kesempatan yang sama seperti halnya masyarakat normal pada umumnya, selain itu komite daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Provinsi Bali juga sering memberikan bantuan sosial atau sembako kepada beberapa yayasan khusus disabilitas, selain melakukan edukasi dan memberikan bantuan komite daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Provinsi Bali juga berperan aktif menjembatani aduan – aduan masyarakat difabel di bali ke instansi terkait aduan yang masuk untuk melindungi hak – hak disabilitas di Bali.

4.3 Analisis Temuan

4.3.1 Analisis temuan pada Welfare di bidang pendidikan

Analisis dalam temuan *Welfare* di bidang pendidikan adalah masih banyak yang perlu di perhatikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, dari hasil temuan didapatkan analisis bahwa pada objek penelitian yaitu masyarakat tuna daksa Bali mengalami kekurangan dalam infrastruktur seperti jumlah sekolah yang masih terbilang sedikit dan juga masih cukup banyak universitas atau perguruan tinggi yang belum mendukung sepenuhnya masyarakat tuna daksa bali dalam melakukan kegiatan pendidikan. Lalu pada objek penelitian masyarakat tuli Bali juga mengalami kekurangan dalam bidang pendidikan seperti mereka Terkendala dualisme bahasa yaitu SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) sebagai bahasa isyarat resmi dan juga BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) sebagai bahasa yang berkembang di masyarakat tuli di seluruh Indonesia. Dan juga masyarakat tuli bali mereasa bahwa infrastruktur dan staff pengajar perguruan tinggi belum mendukung masyarakat tuli seperti beberapa kampus masih belum mempunyai juru bahasa isyarat. Pada objek penelitian masyarakat tuna netra didapatkan fakta bahwa pendidikan dari jenjang sekolah dasar – sekolah menengah atas sudah cukup baik namun pada perguruan tinggi atau universitas dirasa sangat kurang pada kurangnya orang yang bertugas menuntun masyarakat tuna netra dalam masa pembelajaran. Hak mendapatkan pendidikan yang layak untuk

masyarakat difabel di Bali dirasa, Negara belum dapat menjamin keberlangsungannya, seperti hasil temuan diatas, banyak teman – teman difabel yang merasa bahwa masih kurangnya instansi sekolah luar biasa atau instansi pendidikan khusus anak difabel dan juga masih yang salah satu penyebabnya keraguan suatu perusahaan akan kondisi fisik sang difabel. Dan juga pemerintah tidak pernah membantu dia dalam mendapatkan pekerjaan, tapi difabel lah harus berinisiatif sendiri, tidak harus juga untuk bekerja untuk orang ataupun di suatu perusahaan, Danio berkata bahwa dia bangga bisa berdiri dengan kaki sendiri yaitu dengan membuat lapangan pekerjaannya sendiri. Lain Halnya dengan penyandang tuna netra yang beberapa bulan ini mengeluhkan tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti biasanya dikarenakan karena adanya pandemi seperti sekarang ini yang membuat penjualan hasil kerajinan tangan teman – teman tuna netra mengalami penurunan dan juga pandemi ini berdampak pada pasien pijat yang menurun, dan selain itu bapak I Gede Winaya juga mengharapkan jika pemerintah membantu kondisinya sekarang ini karna beliau mengatakan hampir sangat susah untuk mendapatkan 1 pasien setiap hari untuk makan sehari - sehari dan membiayai kehidupan keluarga. Hal yang berbeda datang juga *Bali Deaf Community*, mereka berkata bahwa teman– teman tuli sangat sulit mencari kerja yang layak, dan ketika peneliti bertanya apa saja perusahaan yang menerima teman – teman tuli sebagai

pekerja, Bali Deaf Community menjawab bahwa, sudah ada pekerja Tuli di Burger King, Dan ada beberapa perusahaan, pemerintah hingga wiraswasta tapi jumlah ini dirasa masih sangat sedikit.

4.3.2 Analisis Temuan Pada Welfare Di Bidang Pekerjaan

Analisis dalam temuan *Welfare* di bidang pekerjaan adalah masih banyak yang perlu di perhatikan oleh pemerintah dalam bidang pekerjaan, dari hasil temuan didapatkan analisis bahwa pada objek penelitian yaitu masyarakat tuna daksa, masyarakat tuna daksa di rasa masih kurang mendapatkan lowongan pekerjaan yang bisa di masuki teman – teman tuna daksa, dan kebanyakan dari mereka dapat bekerja jika hanya memiliki koneksi pada perusahaan atau orang – orang lain. Analisis dalam temuan *Welfare* di bidang pekerjaan adalah masih banyak Hak mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat difabel di Bali dirasa masih kurang optimal, meski sudah ada perusahaan yang mengimplementasikan kebijakan publik tentang kewajiban mempunyai pegawai difabel, namun masyarakat difabel di Bali merasakan mereka sulit untuk melamar dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi kehidupan sehari – hari dan juga masyarakat difabel mengharapkan bahwa pemerintah turut serta memabantu masyarakat difabel untuk mencari pekerjaan yang layak. Ini tidak sebanding seperti apa yang dikatakan Asa Brigs yang mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara dengan menjamin pendapatan minimum individu dan keluarga

dengan mengabaikan nilai kerja maupun kepemilikan mereka menurut pasar.

4.3.3 Analisis Temuan Pada Welfare Di Bidang Kesehatan

Hak penjaminan kesehatan bagi masyarakat difabel di rasa masih terasa kurangnya hadirnya peran negara didalam kehidupan masyarakat difabel di Bali. Mereka beranggapan bahwa pemerintah hanya hadir untuk memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat difabel jikalau hanya ada program untuk diselesaikan atau dilakukan namun untuk pemeliharaan seterusnya pemerintah atau instansi terkait terkesan menutup mata dan tidak membantu teman – teman difabel. Ini tidak sebanding seperti apa yang dikatakan Asa Brigs yang mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara dengan menjamin dengan memperkecil situasi ketidakamanan (*insecurity*) yang demikian besar yang memungkinkan setiap orang beserta keluarganya menghadapi “ketidakpastian sosial” (misalnya sakit, usia lanjut, maupun pengangguran) yang akan membawa krisis bagi individu dan keluarga .

4.3.4 Analisis Temuan Pada Welfare Di Bidang Fasilitas Publik Dan Pelayanan Publik

Hak mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas publik untuk teman – teman difabel di Bali dirasa kurang optimal dikarenakan hanya ada satu kabupaten kota yang mempunyai fasilitas dan aksesibilitas di dalam kantor pemerintahan yang menunjang untuk masyarakat difabel di Bali, dan masih kurangnya fasilitas publik

yang membantu teman – teman difabel di Bali. Ini berbanding terbalik seperti apa yang dikatakan Asa Briggs yang mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan sosial dengan standar sosial dan juga tanpa membedakan status sosial dan kelas sosial.

4.3.5 Analisis Konsepsi Pemerintah pada difabel di Bali

Analisis yang didapatkan dalam temuan dilapangan atas Konsepsi Pemerintah pada difabel di Bali, pemerintah Bali belum dapat menjamin Hak – Hak masyarakat difabel dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, fasilitas publik dan pelayanan publik dikarenakan dengan terkendalanya data jumlah penduduk disabilitas masyarakat Bali, kurangnya Anggaran, proses Birokrasi, dan pemerintah bali belum dapat menjamin berjalannya kebijakan dan hukum yang berlaku dengan baik dan optimal. Critical Theory dari Iris Maroune Young berkata bahwa negara yang belum bisa mengimplentasikan kesejahteraan bagi suatu masyarakat adalah suatu negara yang belum dapat bertransformasi sudut pandang dan belum memahami kondisi sosial suatu kaum minoritas dalam hal ini adalah masyarakat difabel di Bali.

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini yakni mengkaji tentang apakah teori negara kesejahteraan atau *Welfare State* dan *Critical Theory* terjadi pada kehidupan masyarakat difabel di daerah

Badung dan Denpasar menghasilkan suatu uraian. Uraian tersebut yakni teori *Welfare State* atau negara kesejahteraan ini berhasil sekaligus tidak berhasil terjadi di kabupaten Badung dan Denpasar Bali. Hal yang dimaksud ialah teori *Welfare State* akan terjadi jika pemerintah atau pihak – pihak terkait yang seharusnya membantu masyarakat difabel ini mempunyai suatu tujuan atau maksud tertentu, .Lalu *Welfare State* tidak terjadi pada kehidupan teman – teman difabel di Badung dan Denpasar Bali dikarenakan tidak adanya kepentingan atau *urgency* dari pihak pemerintah untuk membantu atau ikut memelihara teman – teman difabel, lalu negara Indonesia belum mampu untuk menjamin hak – hak masyarakatnya seperti tidak adanya jaminan pendidikan, penghasilan yang layak dan kesehatan dan juga tidak adanya kepentingan suatu golongan yang dimana mendorong pemerintah untuk menjamin hak masyarakat difabel. Dan pemerintah belum dapat melihat penjaminan hak masyarakat difabel dalam sudut pandang masyarakat difabel.

6.DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, Oman Sukmana & Masduki. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang : Intrans Publishing
- Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sutinah dan Suyanto, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutjihati Somantri. (2012). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT Refika Aditama

Jurnal

Winda Roselina Effendi (2017). KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA.

Henry Arianto, SH, MH (2017). HAK-HAK BAGI PARA PENYANDANG CACAT(DISABILITAS) DALAM MEMPEROLEH KEADILAN. *Falkultas Hukum Universitas Esa Unggul*. Diunduh pada 11 November 2019. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-9118-5_0015.pdf

SKRIPSI

Abdul Haris Mubarak (2011). "Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Tubuh di PSBD Wirajaya Makassar" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diunduh 12 November 2019, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10687/_full.pdf

Pujianti (2018). "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel di kota PANGKALPINANG" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diunduh 12 November 2019, http://digilib.uin-suka.ac.id/32942/1/14250095_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Tridiwa Arief Sulistyio (2016). "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diunduh 12November2019,<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35271/1/TRIDIWA%20ARIEF%20SULISTYO-FDK.pdf>

Jordy Alexi Yohans (2019). "BAHASA ISYARAT INDONESIA DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL TULI DAN"MASYARAKAT DENGAR" DI KOTA DENPASAR" Diunduh 18 November 2019,